



PUTUSAN

Nomor 1064/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Sri Handa Yulianti binti Muhdim, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Enjer Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Herman bin Amaq Marjan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu adalah Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Enjer Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 19 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 1064/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 19 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2013 di Dusun Enjer, Desa

Hal. 1 dari 12



Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 677/38/VII/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kopang tanggal 20 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Enjer, Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun , kemudian tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Enjer, Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Lhidyia Srihermawati, perempuan, umur 4 tahun, dalam asuhan Penggugat; ;
4. Bahwa sejak 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan karena kurang tanggung jawab Tergugat;
 - b. Tergugat keluar negri sejak tahun 2016 hingga sekarang;
 - c. Tergugat menceraikan Penggugat tahun 2017 di luar sidang Pengadilan Agama;
 - d. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun terakhir;
 - e. Sejak satu tahun terakhir tidak ada lagi komunikasi dan nafkah zahir bathin dari Tergugat;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;



6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Herman bin Amaq Marjan) terhadap Penggugat (Sri Handa Yulianti binti Muhdim) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidaair :

Dan atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1064/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 24 Oktober 2018 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 26 November 2018 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 12



a. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat NIK: 5202094806990001, tanggal 10 Nopember 2017 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 677/38/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang tanggal 20 Agustus 2013 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 471.2/440/DSB/2018 tanggal 18 Oktober 2018 telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

b. Saksi-saksi :

1. H. Mustafa Sagir bin Alidah, umur 32, agama Islam, pekerjaan Staf Desa., tempat tinggal di Dusun Enjer Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2013
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Enjer, Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun , kemudian tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Enjer, Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat Tergugat terjadi ketidakharmonisan karena kurang tanggung jawab Tergugat, Tergugat keluar negri sejak tahun 2016 hingga sekarang, Tergugat menceraikan Penggugat tahun 2017 di luar sidang Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun terakhir, sejak satu tahun terakhir tidak ada lagi komunikasi dan nafkah zahir bathin dari Tergugat;;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Supar Bin Amaq Sayuti, umur 55, agama Islam, pekerjaan Petani., tempat tinggal di Dusun Enjer , Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2013
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Enjer, Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang

Hal. 5 dari 12



Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun , kemudian tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Enjer, Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat Tergugat terjadi ketidakharmonisan karena kurang tanggung jawab Tergugat, Tergugat keluar negri sejak tahun 2016 hingga sekarang, Tergugat menceraikan Penggugat tahun 2017 di luar sidang Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun terakhir, sejak satu tahun terkahir tidak ada lagi komunikasi dan nafkah zahir bathin dari Tergugat;;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Hal. 6 dari 12



Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak, didalam rumah tangganya awalnya baik namun mulai tahun sering terjadi cekcok disebabkan karena pada tahun Penggugat meninggalkan Tergugat dan dari sejak itu Penggugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan bahkan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim

Hal. 7 dari 12



agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah : Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi dan apa yang menyebabkan pecahkan dalam rumah tangganya ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بيئة

Artinya : “memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengkuai dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang meikah pada tanggal 18 Agustus 2013
2. Bahwa, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa, penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat Tergugat terjadi ketidakharmonisan karena kurang tanggung jawab Tergugat, Tergugat keluar negri sejak tahun 2016 hingga

Hal. 9 dari 12



sekarang, Tergugat menceraikan Penggugat tahun 2017 di luar sidang Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun terakhir, sejak satu tahun terakhir tidak ada lagi komunikasi dan nafkah zahir bathin dari Tergugat;

4. Bahwa, sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;

5. Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat

6. Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud

Hal. 10 dari 12



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Herman bin Amaq Marjan**) kepada Penggugat (**Sri Handa Yulianti binti Muhdim**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp326000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu)**.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami Dr. Imran, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Mukrim, MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.

Hal. 11 dari 12



Jalaluddin, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat,
tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Mukrim, SH, MH.
Hakim Anggota II

Imran, S.Ag, MH

Drs. H. Moh. Nasri, B.A, MH

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, SH

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|---|-------------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan: Rp. 85.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi: Rp. 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai : Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 326.000,00 |
| (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) | |